BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Minimnya Anggaran dan Personil unit Reskrim Polsek Tapa

Polsek tapa khususnya Unit Reskrim merupakan garda terdepan dalam pelayanan mesyarakat. Sebagai garda terdepan unit Reskrim Polsek Tapa senantiasa memberikan pelayanan terbaik melalui penanganan kasus cepat, walaupun begitu banyak jumlah kasus yang ditangani. Seperti halnya tahun 2015 unit reskrim hanya mendapatkan alokasi anggaran yang cukup menangani masingmasing 5 kasus ringan dan mudah. Padahal kasus yang di tangani sangatlah banyak yakni 156 kasus. Kasus ini terdiri dari 14 mudah dan 142 ringan. Jumlah kasus yang sangat fantastis bila dibandingkan dengan Polsek lainnya. Bahkan presentase jumlah kasus yang ditangai mencapai 28,5% dari total kasus yang di laporkan di wilayah kerja Polres Bone Bolango.

Akan tetapi pelayanan terbaik unit Reskrim tidak berbanding lurus dengan sumber daya yang dimiliki. Seperti halnya alokasi anggaran yang dimiliki sangat jauh dari kata cukup. Total anggaran diberikan biasanya hanya dapat mengcover 10 kasus yang terdiri dari 5 kasus mudah dan ringan. Padahal kasus yang ditangani mencapai 156 terdiri dari 14 mudah dan 142 ringan. Kondisi ini pun diikuti oleh SDM yang sedikit bila di bandingkan 10 Polsek yang berada di wilayah keja Bone Bolango. Seperti halnya Polsek Tapa, harusnya memiliki 37 personil namun hanya mendapatkan 30 personil. Terlebih pada unit reskrim hanya memiliki Besarnya jumlah personil yang harus dimiliki tidak lepas dari luasan daerah dan jumlah penduduk Polsek Tapa yang begitu besar bila dibandingkan yang lain. Akan tetapi yang terjadi mala sebaliknya, unit Reskrim Polsek Tapa

memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat. Walaupun sebagai catatan keberhasilan unit Reskrim Polsek Tapa dalam menangani berbagai kasus tidak lepas peran serta anggota reskrim, seluruh anggota polsek dan masyarakat.

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Keberhasilan unit Reskrim dalam menangani kasus tentu tidak lepas dari peran seluruh pihak baik anggota unit reskrim, anggota polsek dan masyarakat. Polsek Tapa pun berhasil mewujudkan konsep anggaran berbasis kinerja, sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Akan tetapi titik tekan menggapai keberhasilan terhadap upaya mewujudkan anggaran yang efektif dan efisien dikarenakan 3 hal yakni. Pertama *Budget Planing* atau perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran menjadi sangatlah penting karena pada titik inilah semua dibicarakan. Bagian ini berusaha memproyeksikan terhadap pendapatan dan pengalokasian anggaran. Salah dalam membuat perencanaan tentu memberi efek terhadap kinerja unit. Efek tersebut tidak lepas dari tidak maksimalnya kinerja unit reskrim.

Kedua *budget cuts* yakni pemotongan anggaran pada hal-hal yang tidak dianggap *urgent*. Bahkan model ini menghilang *item* yang dianggap tidak penting. Model ini menjadikan seluruh kebutuhan menggunakan harga minimum bukan normal.

Ketiga *mediation* yakni cara mempertemukan antara pihak pelapor dan terlapor untuk mencari solusi melalui proses musyawarah, yang berunjung pada perdamaian. Pada sisi yang lain tulisan ini memberikan gambaran kepada kita terhadap mekanisme pengganggaran di unit reskrim Polsek Tapa.

5.2. Saran

Penelitian ini padadasarnya telah menjelaskan beberapa poin penting terhadap upaya implementasi anggaran pada polsek Tapa, sehingga berjalan efektif dan efisien. Hal ini dapat diamati dari sejumlah kasus yang dapat ditangani di tengah minimnya personil dan jumlah anggaran. Akan tetapi penelitian ini tidak secara detail menjelaskan *item* apa saja yang dilakukan pemotongan anggaran, pada poin *budget cuts*. Sehingga menjadi pertanyaan selanjutnya pada *item* mana saja penghematan anggaran itu terjadi, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dan oleh karena itu bila ada penelitian lanjutan dari penelitian ini, peneliti rekomendasikan untuk melihat pada *item* apa saja dapat dilakukan penghematan, sehingga mewujudkan implementasi anggaran yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Alvionitasari, R., 2016. *Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 8,9 Triliun*. [Online]

Available at:

https://m.tempo.co/read/news/2016/06/08/078777883/polri-ajukan-tambahan-anggaran-rp-8-9-triliun [Accessed 1 April 2017].

Anon., 2015. Minimnya Anggaran Kendala Polri Selesaikan Tumpukan Kasus.
[Online]

Available at:

http://www.rmoljakarta.com/read/2015/10/13/15992/Minimnya-Anggaran-Kendala-Polri-Selesaikan-Tumpukan--Kasus-[Accessed 1 April 2017].

- Armitage, H. M., Webb, A. & Glynn, J., 2016. The Use of Management Accounting Techniques by Small and Medium-Sized Enterprises: A Field Study of Canadian and Australian Practice. *Accounting Prespectives*, 15(1), pp. 31-69.
- Barth, M. E., 2015. Financial Accounting Research, Practice, and Financial Accountability. *Abacus*, 51(4), pp. 499-510.
- Bastian, I., 2006. Akuntansi Pendidikan. 11th ed. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I., 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS, 2015, Bone Bolango dalam Angka 2015, Bone Bolango : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
- BPS, 2016, Bone Bolango dalam Angka 2015, Bone Bolango : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
- BPS, 2017, Bone Bolango dalam Angka 2015, Bone Bolango : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
- Cevilla, C. G. & et.all., 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Chairunnisa, S., 2013. Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah. *jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), pp. 150-174.
- Chia, Y. M. & Koh, H. C., 2007. Organizational Culture and The Adoption of Management Accounting Practices in The Public Sector: a Singapore Study. Financial Accountability & Management, May, 23(2), pp. 189-213.
- Espinoza, 2014. Skripsi: Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
 Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan, Medan:
 Program Studi Strata 1 Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas
 Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Farwitawati, R., Suroto, B. & Hadiyati, 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), pp. 208-226.
- Gumanti, T. A., 2000. Earnings Management : Suatu Telaah Pustaka. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(2), pp. 104-115.
- Halim, A., 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Hiariej, E. O., 1999. Quo Vadis Kepolisian RI? Telaah Kritis Terhadap Konsep Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang Baru. *Mimbar Hukum*, Volume X, p. 33.
- Hutagalung, 2015. *Minimnya Anggaran Reserse, Kapolri : "Solusinya, Anggaran Satu Perkara Kita bagi Tiga"*. [Online]

 Available at: http://metropolnews.co/nasional/release-ahir-tahun-polri-2015

 [Accessed 1 April 2017].
- Kholid, I., 2015. *Dapat Kenaikan Anggaran Tahun 2016 Jadi Rp 67 T, Ini Fokus Polri*. [Online]

 Available at: http://news.detik.com/berita/2995882/dapat-kenaikan-anggaran-tahun-2016-jadi-rp-67-t-ini-fokus-polri
 [Accessed 1 April 2017].

Kurniawan, T., 2014. Kompolnas Minta Anggaran Polri Dinaikkan Jadi Rp60 T. [Online]

Available at:

http://news.okezone.com/read/2014/09/06/339/1035086/kompolnas-minta-anggaran-polri-dinaikkan-jadi-rp60-t [Accessed 1 April 2017].

- Kundalini, P., 2014. Tugas Akhir ;Analisis Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Periode 2011-2012, Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Diploma III, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J., 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mosal, M. M., 2013. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), pp. 374-382.
- Nanda, R. & Darwanis, 2016. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
 Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD
 Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Imiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),* 1(1), pp. 327-340.
- NEAG, R., 2016. Conservative Accounting Practice Empirical Evidence on the Provisions Presented in the Financial Statements of Listed Companies on Bucharest Stock Exchange. *Juridical Current*, 19(4), pp. 52-63.
- Oleksandrivna, S. T., 2016. Introduction of Elements of Accounting Systems of Foreign Countries in Accounting Practice in Ukraine. *Economic Processes Management*, Issue 2, pp. 88-99.

- Pangkey, I. & Pinatik, S., 2015. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), pp. 33-43.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Dsiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Santoso, U. & Pambelum, Y. J., 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), pp. 14-33.
- Sitompul, J. M., 2015. *Menteri Yuddy miris anggaran Polri minim, minta tetap profesional*. [Online]

 Available at: https://www.merdeka.com/peristiwa/menteri-yuddy-miris-anggaran-polri-minim-minta-tetap-profesional.html
 [Accessed 1 April 2017].
- Sugiono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiono, A., Soenarno, Y. N. & Kusumawati, S. M., 2010. Akuntansi & Pelaporan Keuangan: Untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah. Jakarta: Grasindo.
- Suprayogo, I. & Tobroni, 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosdakarya.
- Taufiqurrohman, 2016. *Tantangan Tito, Mulai Minimnya Anggaran hingga Haluan Polri*. [Online]

 Available at: http://news.liputan6.com/read/2538138/tantangan-tito-mulai-minimnya-anggaran-hingga-haluan-polri
 [Accessed 1 April 2017].
- Tjandra, W. R., 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Tum, K., 2015. Investigating frauds in Government Accounting. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), pp. 892-907.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ke 4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia